

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan pesta demokrasi melalui pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara rutin dan teratur merupakan salah satu bentuk riil dalam perwujudan demokrasi prosedural. Konsepsi demokrasi prosedural diilhami oleh pemikir Jerman *Joseph Schumpeter*, dimana dalam pandangan Demokrasi nya lebih ditekankan pada proses pemilihan umum. Bagi Schumpeter demokrasi lebih dimaknai sebagai sebuah sistem untuk membuat keputusan-keputusan politik dimana individu-individu mendapat kekuasaan melalui pertarungan yang kompetitif dalam memperebutkan suara rakyat.<sup>1</sup> Alur pikir seperti ini sangat jelas arahnya yakni pemilu sebagai pintu masuk dalam melihat bentuk demokrasi. Pandangan ini pun juga diperkuat oleh Samuel Huntington dalam buku *Gelombang Demokrasi Ketiga* yang menyatakan bahwa pemilu yang kompetitif merupakan esensi dari demokrasi. Sebagaimana dikatakan Sutoro Eko, dalam demokrasi prosedural, pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi tiga hal pokok. *Pertama*, kontestasi antara aktor-aktor politik untuk meraih kekuasaan. *Kedua*, partisipasi pemilih yang menentukan pilihan dan *Ketiga*, liberalisasi hak-hak sipil maupun politik warga negara.<sup>2</sup>

Dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia tentu tidak pernah terlepas dari peran setiap warga negara nya, karena hal itu menjadi hak

---

<sup>1</sup> Mochtar Haboddin, 2017 "*Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia*", Malang: UB Press, , Hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm.3.

konstitusional setiap warga negara baik untuk memilih maupun dipilih. Sebagaimana pemilu yang diselenggarakan atas dasar manifestasi prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (*equal opportunity principle*). Kemajuan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia mulai ditandai dengan adanya kebebasan mengemukakan pendapat, pembatasan atas kekuasaan, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan jabatan-jabatan publik yang kompetitif, termasuk salah satunya pemilihan kepala daerah (pilkada). Pilkada merupakan konsekuensi fundamental dalam penyelenggaraan demokrasi. Seperti apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 4 disebutkan bahwa:

*“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara Demokratis”.*

Pilkada sendiri merupakan suatu aktivitas dari proses demokrasi yang memiliki *output* yakni pejabat politik (*elected official*), bukan memilih pejabat administratif (*appointed official*). Pilkada merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat maka penyelenggaraan Pilkada yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah daerah. Maka Pilkada memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, Pilkada merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan di suatu daerah.

Momen pilkada serentak yang telah berlangsung tentu menjadi satu hal yang cukup menarik untuk diamati dalam serangkaian proses dan dinamikanya. Menurut Husni Kamil Manik selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat<sup>3</sup>, menyatakan bahwa

*“... Model pemilihan serentak ini merupakan yang pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia. Indonesia harus dicatat dalam sejarah demokrasi dunia karena tercatat ada 269 daerah terdiri atas 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten yang secara serentak akan memilih kepala daerah”.*

Artinya, sekitar 53% dari total 537 jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak gelombang pertama. Adapun nantinya juga dilaksanakan pilkada serentak gelombang kedua, ketiga dan selanjutnya.

Berkaitan dengan pencalonan pasangan calon kepala daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 40 ayat (1),

*“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (Dua Puluh Persen) dari kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari akumulasi perolehan suara sah dari pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”.*

Pasal 40 ayat (1) ini menjadi kewenangan partai politik ataupun gabungan partai politik sekaligus syarat untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah.

Berdasarkan dari peraturan mengenai pelaksanaan pilkada, serta dinamika politik yang terus berkembang, maka mengisyaratkan setiap partai

---

<sup>3</sup> Pidato Ketua KPU Husni Kamil Manik pada launching penetapan tahapan pilkada serentak di Kantor KPU Jakarta Pusat, tanggal 17 April 2015.

politik untuk membangun sebuah koalisi. Dimana koalisi sendiri berarti persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, dimana dalam setiap kerja samanya masing-masing berangkat pada kepentingannya sendiri.

Hubungan berupa koalisi ini bisa hanya bersifat sementara atau kerja sama jangka pendek. Secara khusus pada konteks pilkada, koalisi disini yaitu adanya kerja sama beberapa partai politik yang mendelegasikan atau mencalonkan pasangan kepala daerah. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi terbentuknya koalisi tersebut, bisa karena adanya kesamaan ideologi, platform politik dan visi-misi yang dibawa, bisa karena sama-sama memiliki calon kepala daerah potensial yang akan diusung, bisa juga karena untuk sebatas memenuhi persyaratan administratif yang telah ditentukan agar bisa mengusung pasangan calon, namun kesemuanya itu bersifat fleksibel dan dinamis karena setiap partai memiliki mekanisme dan strategi yang berbeda-beda.

Pada negara yang menganut sistem Multi Partai, tentunya koalisi menjadi suatu keniscayaan, sekalipun itu pada partai pemenang pemilu. Hal ini didasari pada jumlah massa banyak yang terpecah pada banyak simpul Partai. Pun juga dengan negara penganut Presidensial Multi Partai seperti Indonesia, pemenang pemilu yang akan berperan sebagai aktor berkuasa untuk mengendalikan semuanya (*the winner take all*) memerlukan koalisi agar pemerintahannya menjadi kuat dengan legitimasi partai koalisi.<sup>4</sup>

Sebagai upaya partai politik dalam menuju kesuksesan pilkada tentunya tidak hanya sebatas mengandalkan mesin partai politik saja, karena

---

<sup>4</sup>. Khanif Idris, Merajut Koalisi, 2012. <http://khanifidris.blogspot.com/2012/06/koalisi-adalah-pengelompokan.html> diakses pada tanggal 19 Februari 2017 Pk. 05.06.

dalam setiap kali peristiwa politik dilangsungkan baik itu pada level nasional maupun level daerah tentu tidak akan terlepas dari salah satu elemen penting demokrasi yakni “*civil society*”. Pada era kedaulatan rakyat di alam demokrasi saat ini istilah *civil society* lazimnya merujuk kepada perkumpulan atau organisasi-organisasi Non-Pemerintahan. Lebih umum lagi *civil society* di Indonesia dapat dilihat dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Secara konsepsi posisi *civil society* dalam struktur politik berada diluar pemerintahan, namun bukan berarti kelompok-kelompok tersebut tidak terlibat dalam urusan politik negara. Baik itu *political control* yang dilakukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah maupun parlemen dalam bentuk advokasi isu-isu tertentu, disamping itu juga berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam merealisasikan program-programnya dan juga diharapkan memiliki andil dalam menentukan kepemimpinan nasional maupun daerah.

Sebuah riset politik di Afrika Barat baru-baru ini memperlihatkan bagaimana kelompok-kelompok *civil society* khususnya organisasi kemasyarakatan (Ormas) terlibat secara intens dalam kerja sama dengan partai politik selama masa kampanye pemilu.<sup>5</sup> Mereka bersama-sama menyorot isu-isu nasional yang menarik bagi warga. Para aktivis *civil society* yang biasa bertemu dengan para eksekutif senior partai dan mengorganisir berbagai konferensi bersama. Berdialog, menulis surat atau

---

<sup>5</sup> Oxfam Research Reports December 2013, “*Civil Society Engagement With Political Parties During Elections: Lesson From Ghana and Siera Leone*”, dalam Tjahjo Kumolo, “*Politik Hukum Pilkada Serentak*”, Jakarta: Expose-PT Mizan Publika, Hlm. 118-119.

petisi kepada partai politik untuk membujuk mereka dalam mengakomodasi kepentingan rakyat di level kebijakan dan janji-janji kampanye mereka.

Dengan pendekatan seperti itu menurut penelitian tersebut, *civil society* berhasil mempengaruhi manifesto-manifesto partai politik. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa *civil society* yang kuat dan partai-partai yang mapan merupakan prasyarat bagi demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik.

Konsolidasi demokrasi tidak mungkin tanpa *civil society* yang kuat dan mandiri serta partai-partai yang representatif, maka keduanya saling melengkapi. Walaupun *civil society* dapat menginisiasi transisi demokrasi tapi hanya dengan bantuan partai-partai politik lah mereka dapat melembagakan proses politik yang demokratis. Maka sebenarnya terdapat ketergantungan diantara keduanya. Keduanya memediasi antara individu dan negara, tetapi keduanya melakukannya dengan cara yang berbeda karena memang memiliki fungsi yang berbeda. Meskipun kadang-kadang partai politik dianggap sebagai bagian dari *civil society*, karena mereka umumnya memiliki basis keanggotaan yang besar dan kerap bersifat swadaya, mereka tetaplah entitas yang berbeda karena mereka berusaha untuk berkuasa, sementara *civil society* akan tetap berada pada posisi diluar struktur kekuasaan.

Partai politik bekerja pada wilayah formal dan struktural, sementara *civil society* mengambil peran di ranah substansial dan kultural. Sehingga keduanya sama-sama berfungsi sebagai pilar demokrasi, karena demokrasi juga membutuhkan topangan kultural selain dukungan struktural.

Usaha-usaha pendidikan dan penyadaran politik warga negara yang kini mulai banyak dilakukan oleh *civil society*, merupakan upaya membangun budaya demokrasi ditengah masyarakat. Melalui usaha-usaha tersebut diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang mandiri secara politik, dengan begitu masyarakat dapat berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.<sup>6</sup>

Masyarakat masih sering kali memandang bahwa antara *civil society* dengan partai politik berada pada posisi berseberangan. Padahal sejatinya tidak seperti itu, sebab baik *civil society* maupun partai politik sama-sama memainkan peran penting dalam demokrasi.<sup>7</sup> Yang pertama mewakili kepentingan kelompok-kelompok masyarakat, menarik perhatian publik terhadap berbagai persoalan sosial, memprakarsai inisiatif-inisiatif warga, berkontribusi dalam pengambilan-pengambilan keputusan, sementara itu yang kedua bertanggung jawab langsung dalam menciptakan proses-proses politik, baik ketika ia berada dalam pemerintahan koalisi maupun diluar (oposisi). Tentu sangatlah ideal jika keduanya berkiprah di wilayahnya masing-masing, namun tetap saling berkomunikasi dan bekerja sama secara konstruktif.

Pada era orde reformasi atau transisi demokrasi pada saat ini, menarik untuk mengkaji peran Muhammadiyah sebagai salah satu dari beberapa Ormas yang ada Indonesia, yang dirasa memiliki peran dan posisi cukup strategis, dengan melihat bagaimana pola hubungan antara Muhammadiyah dengan pemerintah maupun dengan partai politik yang ada.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm. 120.

<sup>7</sup> Tjahjo Kumolo, 2015 "*Politik Hukum Pilkada Serentak*", Jakarta: Expose-PT Mizan Publika, Hlm. 118.

Tak jarang pula pada beberapa kali politik pemilihan (*electoral politics*) di tingkat lokal, Muhammadiyah melalui elite-elitenya melibatkan diri baik secara langsung maupun tidak langsung. Khususnya pada daerah yang memiliki basis kader maupun simpatisan yang cukup kuat, disamping itu juga melihat bagaimana realitas politik pada suatu daerah tersebut yang dianggap memiliki kinerja yang kurang maksimal atau bahkan buruk, maka mendorong Muhammadiyah untuk tampil didalam kontestasi tersebut. Sehingga pada 2013, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan keputusan No. 41/KEP/I.O/B/2013 tentang aktivitas politik pimpinan Muhammadiyah. Untuk pencalonan Dewan Perwakilan Daerah RI serta Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Calon Walikota/Wakil Walikota, dan Calon Bupati/Wakil Bupati, berlaku ketentuan berikut (a) apabila yang bersangkutan menduduki sebagai Pimpinan Harian pada Pimpinan Persyarikatan, Organisasi Otonom, Badan Pembina Harian, dan Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah, maka harus berhenti dari jabatannya, tetapi tetap menjadi anggota Pimpinan Persyarikatan, anggota Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, anggota Pimpinan Organisasi Otonom, anggota Badan Pembina Harian, dan/atau tenaga tetap/tidak tetap di Amal Usaha Muhammadiyah; (b) di luar posisi tersebut pada huruf (a) diperbolehkan untuk tetap menduduki posisi dan statusnya sesuai dengan jabatan yang selama ini diamanatkan kepadanya. Keluarnya peraturan tersebut tidak terlepas dari dinamika politik nasional paska reformasi yang membuka liberalisasi politik.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Achmad Nurmandi, dalam 2015 "*Ijtihad Politik Muhammadiyah – Politik Sebagai Amal Usaha*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 234.



Pilkada langsung dan serentak pada tahap pertama yang berlangsung pada Desember 2015 ini menjadi tantangan bagi kelompok-kelompok *civil society* untuk membuktikan diri sebagai pilar demokrasi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Karena partai politik bekerja di ranah yang berbeda sesuai dengan prioritas programnya masing-masing, *civil society* bersifat lintas batas, menerobos kepentingan-kepentingan pragmatis yang tidak sepenuhnya dapat dihindari oleh partai politik, sehingga semakin memperkuat posisi nya sebagai “*interest group*”.

Menarik untuk dikaji kembali oleh peneliti dari salah satu pelaksanaan Pilkada yaitu di Kabupaten Sleman, dimana ditengah konstalasi politik yang telah berlangsung menunjukkan peran kerja sama yang cukup menonjol antara salah satu partai politik yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dengan salah satu organisasi kemasyarakatan yang berbasis keagamaan yaitu Muhammadiyah. Dimana lembaga tersebut memainkan perannya masing-masing namun memiliki tujuan dan kepentingan yang sama yaitu menyukseskan pasangan calon kepala daerah Sri Purnomo dan Sri Muslimatun. Meskipun dari apa yang nampak dipermukaan relasi yang terbangun diantara keduanya hanya untuk kepentingan mobilisasi suara, namun dibalik itu juga terdapat nilai-nilai yang ingin dialokasikan dalam proses pilkada tersebut.

Pada 2010, secara terang-terangan Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Sleman memobilisasi dukungan politik bagi pasangan Kepala Daerah Sri Purnomo dan Yuni Satia Rahayu yang disusung partai koalisi PAN, PDI-P dan Gerindra yang berhasil meraih

---

suara terbanyak 174.571 suara atau 35,18%. Di wilayah Sleman terdapat basis pengikut Muhammadiyah, PAN dan PDI-P yang loyal, sehingga dalam memobilisasi masa dapat lebih efektif dan target kemenangan melalui satu putaran pun tercapai. Dimana Muhammadiyah merupakan salah satu Ormas Islam terbesar di Kabupaten Sleman dan PDI-P merupakan partai pemenang Pemilu di Kabupaten Sleman, serta PAN merupakan partai pemenang Pemilu ketiga.

Adapun di Kabupaten Maros, Pengurus Daerah Muhammadiyah juga secara tersirat memberikan himbauan untuk memperjuangkan dan memilih kandidat yang berlatar belakang Muhammadiyah. Meskipun tidak dilakukan secara tersurat melalui (SK) tetapi konsolidasi organisasi terus dilakukan. Mengingat jumlah suara partai pengusungnya yaitu PAN dan PBB pada pemilu legislatif 2009 hanya sebesar 22.145 dari total jumlah pemilih 171.263 dengan 6 pasangan kandidat kepala daerah. Namun pada akhirnya berhasil memenangkan pasangan M.M Hatta Rahman dan Andi Harmil Mattorang dengan perolehan suara 66.138 suara (38,62%).<sup>9</sup>

Dalam pengambilan kebijakan di level kelembagaan persyarikatan Muhammadiyah di wilayah DIY yang berkaitan dengan pemberian dukungan khususnya di Kabupaten Sleman bukan saja hanya saat pilkada pada tahun 2015 saja, namun mulai dari pilkada 2005 dan 2010, selain itu dalam pencalonan anggota DPD RI pun juga turut memberikan dukungan sejak Pemilu 2004 silam. Karena disamping kader-kader Muhammadiyah sendiri yang dianggap potensial untuk menduduki posisi-posisi tersebut, namun juga karena kedua lembaga tersebut lah yang dianggap paling efektif

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal. 235.

untuk menginfiltrasikan segala bentuk kepentingannya dan mampu menjadi katalisator bagi Muhammadiyah dan anggota-anggota nya.

Terbangunnya relasi antara PAN dengan Muhammadiyah di Kabupaten Sleman tentu tidak terlepas dari sosok Sri Purnomo, yang mana beliau merupakan Ketua Majelis Penasehat DPD PAN Kabupaten Sleman dan juga memiliki andil sejak awal dalam pendirian partai tersebut di Kabupaten Sleman, serta Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman dan merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah di Sleman yang menonjol. Melalui posisi strategisnya tersebut tentu Sri Purnomo mampu mengambil peran yang strategis pula sehingga dapat terciptanya relasi antara kedua lembaga tersebut dengan baik dan tetap solid. Apalagi secara *track record* Sri Purnomo yang sudah duduk di kursi Wakil Bupati sejak 2005-2010, dilanjutkan pada 2010-2015 yang duduk sebagai Bupati dan kini masih diamanahkan untuk duduk sebagai Bupati kembali pada 2015-2020 memang dianggap mampu memberikan kinerja yang baik dan memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan PAN dan Muhammadiyah di Kabupaten Sleman.

Wilayah Kabupaten Sleman yang memang mayoritas beragama Islam, dan secara ideologis memang mayoritas juga merupakan pengikut Muhammadiyah karena memang wilayah DIY salah satunya Kabupaten Sleman merupakan basis dari Muhammadiyah. Dalam hal politik tentu menjadi sangat diperhitungkan, dari segi ketokohan banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang duduk di kursi pemerintahan, aktif di partai politik khususnya PAN. Selain itu banyak juga kader Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah seperti Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyiyah (NA),

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) yang turut aktif pada organisasi sayap politik PAN seperti Barisan Muda (BM) PAN, Sekar Surya, maupun laskar-laskar yang terbentuk dibawah naungan DPD PAN Sleman.

Hal ini semakin memperkuat bagaimana pandangan Caroline Paskarina yang menyebutkan bahwa kelompok kepentingan sudah “*go politics*”. Maksudnya adalah kelompok kepentingan pro-demokrasi tidak lagi memposisikan dirinya sebagai aktor diluar kekuasaan, tetapi menjadi bagian dan turut serta dalam pertarungan meraih jabatan-jabatan publik.<sup>10</sup>

Kontestasi pilkada Kabupaten Sleman diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, berdasarkan keputusan dan penetapan SK KPUD Kabupaten Sleman 21/KPTS/KPU-Kab-013.329625/2015 Tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman 2015, yaitu pasangan nomor urut 1 (satu); Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu SS,M.Hum dengan Danang Wicaksana Sulistya, ST (YUDA), yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sedangkan pasangan nomor urut 2 (dua); Drs. H. Sri Purnomo, M.S.I dengan Dra. Hj. Sri Muslimatun M.Kes (SANTUN), yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan

---

<sup>10</sup> Caroline Paskarina, dkk. 2015 “*Berebut Kontrol Atas Kesejahteraan*”. Jogjakarta: Polgov dan PCD,. Hlm. 8.

Pembangunan (PPP), serta didukung oleh Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)<sup>11</sup>.

Dari kedua pasangan tersebut juga terdapat satu fenomena yang menarik yakni terjadinya pecah kongsi pada pasangan bupati dan wakil bupati. Partai politik pengusung yang pada dua pilkada sebelumnya, yaitu tahun 2005 dan 2010 selalu bekerja sama, kini harus berseberangan dan membangun poros koalisi sendiri. Bukan hanya itu, salah satu kader terbaik PDI-P Kabupaten Sleman yang juga duduk di DPRD Kabupaten Sleman yaitu Sri Muslimatun justru digandeng oleh Sri Purnomo untuk mendampingi dalam pilkada kabupaten Sleman. Hal inipun semakin membuat hubungan kedua partai ini cukup tegang.

Maka polemik-polemik pun tidak dapat dihindari, mulai dari beredarnya isu dengan adanya upaya penjegalan pasangan Sri Purnomo dan Sri Muslimatun untuk maju dalam Pilkada, bahkan sampai pada intervensi kader maupun simpatisan PDI-P yang masih mendukung Sri Muslimatun. Sementara itikad baik Sri Muslimatun yang telah mengajukan pengunduran diri sebagai Pimpinan DPC PDI-P Kabupaten Sleman belum mendapat SK dari DPP PDI-P, selain itu juga belum diturunkannya SK pergantian antar waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Melalui berbagai upaya yang telah ditempuh, bakal calon wakil bupati Sri Muslimatun akhirnya mendapatkan angin segar dengan terbitnya Surat Edaran (SE) 706/KPU/X/2015 yang

---

<sup>11</sup> Dikutip dari Berita Jogja Satu, diakses pada 14 Maret 2016 dari <http://www.jogjasatu.com/137-yunidanang-dan-sri-purnomomuslimatun-resmi-bertarung-di-pilkada-sleman.html>

dikeluarkan KPU. Dalam surat itu, KPU memberikan kemudahan bagi calon yang terganjal masalah administratif, namun tetap harus memenuhi syarat pencalonan. Tim Sukses Sri Purnomo dan Sri Muslimatun menyambut baik keputusan tersebut, yang pada akhirnya pasangan ini melaju pada babak selanjutnya<sup>12</sup>.

Dari hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara, pasangan nomor urut satu Yuni Satia Rahayu dan Danang Wicaksana Sulistya (YUDA) memperoleh 227.633 suara, sementara pasangan nomor urut dua Sri Purnomo-Sri Muslimatun (SANTUN) mendapatkan 297.267 suara. Dengan hasil tersebut, Sri Purnomo-Sri Muslimatun unggul dengan selisih sekitar 16 persen dari pasangan lawannya<sup>13</sup>.

Pencapaian kemenangan pasangan ini tentu tidak luput dari peran tim pemenang beserta koalisi partai politik yang mengusung maupun mendukungnya. Disamping pasangan calon yang memiliki konstituen tersendiri dimana hal tersebut menjadi modal politik bagi masing-masing calon, ditopang dengan dukungan dari para relawan maupun Ormas Muhammadiyah yang turut menjadi salah satu faktor penentu kemenangan. Oleh karena itu dibutuhkanlah suatu strategi untuk meraih dukungan massa dengan bermodal pada kesolidan semua lini pendukung guna mencapai

---

<sup>12</sup> Patricia Vicka 2015 : <http://pilkada.metrotvnews.com/read/2015/10/22/183212/sri-muslimatun-diselam-> sri-muslimatun-diselam tkan-surat-edaran-kpu

<sup>13</sup> Dikutip dari Surat Kabar Harian Jogja, Sri Purnomo-Sri Muslimatun Resmi Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman, diakses pada 14 Maret 2016, dari <http://www.harianjogja.com/baca/2015/12/21/hasil-pilkada-sleman-sri-purnomo-kembali-kuasai-sleman-673275>

suatu kemenangan yang ingin dicapai, hal inilah yang disebut dengan proses politik, kesemuanya akan saling berhubungan, baik itu faktor internal maupun eksternal, maka dibutuhkan suatu keadaan *equilibrium* yang dinamis (dalam arti selalu responsif terhadap keadaan).

Berangkat dari sinilah peneliti melihat ketertarikan untuk mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana relasi yang terbangun secara khusus antara DPD PAN Kabupaten Sleman dengan PD Muhammadiyah Kabupaten Sleman untuk memenangkan pasangan Sri Purnomo dengan Sri Muslimatun pada pilkada 2015.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana relasi yang terbangun antara Partai Amanat Nasional dengan Muhammadiyah dalam Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2015 ? “

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada paparan latar belakang diatas, adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Yaitu untuk menggambarkan peran dan fungsi Partai Politik pengusung khususnya DPD PAN Kab. Sleman dalam membangun relasi dengan PD Muhammadiyah Kab. Sleman sehingga mampu saling bersinergi untuk memenangkan pasangan calon Sri Purnomo dan Sri Muslimatun berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing guna meraih simpati dan dukungan masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Sleman 2015.

### **2.3.1 Tujuan Penelitian**

Untuk mendiskripsikan bagaimana relasi yang terbangun antara DPD PAN Kabupaten Sleman dengan PD Muhammadiyah Kabupaten Sleman dalam memenangkan pasangan Sri Purnomo- Sri Muslimatun pada Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2015.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat kepada khalayak umum, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih kepada berbagai pihak akademis sebagai wacana dalam menambah khasanah keilmuan mengenai relasi antara Partai Politik dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam kemenangan Pilkada pada suatu daerah. Secara khusus dapat bermanfaat sebagai penunjang permata kuliah jurusan ilmu pemerintahan dan penelitian selanjutnya.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada partai politik maupun organisasi kemasyarakatan dalam proses kemenangan pada tingkat daerah, dengan harapan mampu melakukan koreksi dalam proses kemenangan yang telah berlangsung.

- b. Bagi Masyarakat.

Supaya masyarakat dapat melihat relasi antara partai politik dengan organisasi kemasyarakatan dalam kemenangan suatu calon kepala



daerah, sehingga kedepannya bisa berperan secara lebih aktif dalam setiap momen pemilu dan mampu menggunakan hak pilihnya secara obyektif dan rasional.

c. Bagi Penulis.

Supaya mampu memahami secara komprehensif bagaimana relasi yang terbangun antara partai politik dengan organisasi kemasyarakatan dalam pemenangan calon kepala daerah hingga berhasil memenangkannya.

## **1.5 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual dalam penelitian ini bertitik tolak pada permasalahan yang diangkat peneliti, dengan mengemukakan pandangan umum atau pemahaman mengenai suatu konsep yaitu relasi antara partai politik dengan organisasi kemasyarakatan dalam pemilihan kepala daerah. Untuk mempertegas kajian, maka perlu kiranya memberikan pengertian terhadap satu persatu konsep mengenai judul sebagai berikut:

### **1.5.1 Pengertian Relasi Politik**

Esensi dari relasi politik adalah adanya hubungan kerja sama yang dibangun partai politik dengan organisasi kemasyarakatan, dalam mencapai suatu kepentingan secara bersama. Guna mencapai suatu tujuan kemenangan maka perlu diadakannya konsesi antara partai politik dengan organisasi kemasyarakatan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, agar relasi yang terbangun solid dan saling memahami batasan-batasannya. Adapun beberapa hal yang harus dirumuskan antara lain:

- a. Kerja sama yang dibangun untuk pembagian tugas dalam penggalangan dan mobilisasi massa dalam pembentukan opini ataupun selama masa pemilihan.
- b. Kerja sama untuk tetap menjaga konsistensi dalam memperjuangkan ideologi agar tidak hanya mengejar tujuan praktis semata yakni pilkada.
- c. Kerja sama untuk mengembangkan dan memberdayakan organisasi secara keseluruhan, mulai dari penggalangan dana, pemberdayaan anggota dan kaderisasi.
- d. Partai politik dan organisasi kemasyarakatan memerlukan suatu strategi umum untuk bagaimana menyesuaikan dengan peraturan pemerintah, lawan politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pers dan media.

### **1.5.2 Pengertian Partai Politik**

Menurut Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Miriam Budiardjo, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hlm. 403.

### **1.5.3 Pengertian Organisasi Kemasyarakatan.**

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor.2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Orgaisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang mengedepankan mengakomodasi/memperjuangkan kepentingan masyarakat yaitu kepentingan dan tujuan kesejahteraan sosial atau ekonomi. Adapun terdapat beberapa bentuk dari organisasi ini yang dapat diidentifikasi berdasarkan ideologinya.

### **1.5.4 Pengertian Pilkada**

Pilkada langsung sebagai bentuk pengajawantahan sistem demokrasi langsung, merupakan proses politik lokal, dimana Pilkada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang antara lain Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan

Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten / Kota. Yang mana penyelenggaraannya dilakukan melalui tahapan-tahapan; pendaftaran dan penetapan pemilih, pengajuan calon dan penetapan calon kepala daerah, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan calon terpilih dan pelantikan. Selain itu pilkada langsung dapat disebut sebagai praktik politik demokratis apabila memenuhi beberapa prinsip, yakni menggunakan azas-azas yang berlaku dalam recruitment politik yang terbuka yakni azas langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil (Luber dan Jurdil).<sup>15</sup>

## 1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pendefinisian variabel secara operasional yang berdasarkan pada sifat atau karakteristik terhadap suatu fenomena yang diamati dengan menggunakan parameter yang jelas. Adapun variabel yang akan didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Konsolidasi antara PAN dengan Muhammadiyah

Konsolidasi tersebut menjadi satu langkah awal guna membangun nota kesepahaman antara kedua belah pihak sebelum bekerja sama di arena pilkada, maka dari itu perlunya satu kolektivitas yang harus terbangun guna memaksimalkan perannya masing-masing dalam memenangkan pasangan calon yang telah diusung.

1. Penentuan bakal calon bupati beserta wakil bupati.
2. Perumusan Visi-Misi serta program-program yang akan ditawarkan.

---

<sup>15</sup> Pusat Studi Universitas Muhammadiyah Malang, 2015 "*Jurnal Konstitusi*", (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI), Hlm. 96.

3. Pembentukan simpul-simpul kemenangan.

**b. Mobilisasi/penggalangan dukungan**

Sebagai mana pasangan calon yang telah diusung tentu menjadi salah satu faktor penentu kemenangannya adalah figur pasangan calon dan figur-figur yang menduduki posisi strategis pada partai politik dan ormas tersebut, antara lain:

1. Popularitas dan Elektabilitas pasangan calon.
2. Basis massa serta eliet PAN dan Muhammadiyah.
3. Misi dakwah Islam warga Muhammadiyah.
4. Faktor sosok Amien Rais.

## **1.7 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu prosedur ilmiah yang sistematis (secara terencana dan cermat) dan dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menemukan suatu fakta dan kesimpulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana penelitian kualitatif menurut Bodgan dan Biklen (1990)<sup>16</sup> adalah *“prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar dan individu secara holistic(utuh)”*.

---

<sup>16</sup> Dalam Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2014 *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, Bandung: ALFABETA , Hlm.22.

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif kualitatif*, melalui langkah kerja berupa mendeskripsikan suatu objek, fenomena atau setting sosial yang terejawantahkan dalam suatu kata-kata berupa tulisan yang bersifat naratif<sup>17</sup>. Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi berdasarkan fakta-fakta di lapangan.

### 1.7.2 Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dalam hal ini data primer diperoleh secara langsung di lapangan, dari hasil wawancara langsung dengan subyek penelitian.

#### b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara tidak langsung yang sifatnya melengkapi data primer, antara lain peraturan perundang-undangan, buku, koran, internet dan penelitian terdahulu.

### 1.7.3 Teknik pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data menjadi hal yang sangat penting untuk menjawab permasalahan penelitian. Sementara masalah dalam penelitian nantinya yang akan memberi arah dan mempengaruhi penentuan metode pengumpulan data. Data yang telah diperoleh nantinya akan diolah dan dianalisis dengan metode tertentu. Adapun

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm. 28

metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

**a. Observasi**

Metode observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap subyek yang diteliti yaitu partai politik (DPD PAN Kab. Sleman) dan organisasi kemasyarakatan (PD Muhammadiyah Kab. Sleman), dalam hal ini adalah pelaku-pelaku yang terlibat dalam proses pemenangan pasangan calon (Sri Purnomo – Sri Muslimatun), dimana mereka berada dan biasa melakukan aktivitasnya dalam Pilkada Kabupaten Sleman.

**b. Wawancara**

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melalui dialog langsung dengan sumber data. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, dimana subyek penelitian mendapatkan kebebasan untuk mengemukakan pandangan, pemikiran dan perasaannya secara natural, karena informan yang tahu tentang dirinya sendiri, tentang tindakannya secara ideal yang akan diinformasikan secara benar dan dapat dipercaya<sup>18</sup>.

**c. Dokumentasi**

Selain sumber data yang berasal dari manusia melalui observasi dan wawancara, maka diperlukannya suatu sumber lainnya sebagai pendukung, yaitu dokumen-dokumen tertulis yang resmi maupun tidak resmi, berupa arsip partai politik (DPD PAN Kab. Sleman) dan organisasi kemasyarakatan (PD Muhammadiyah Kab. Sleman), foto

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm.129

dan video selama proses Pilkada, yang semuanya harus mempunyai relevansi dengan obyek penelitian.

**d. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian merupakan tujuan mendapatkan sejumlah informasi tentang unit permasalahan, pengumpulan data serta informasi yang dihasilkan dari subyek penelitian dapat melengkapi jawaban terkait gejala atau masalah yang dihadapi. Oleh karena itu diperlukanlah subyek penelitian yang sesuai dengan kualifikasi peneliti agar mampu memenuhi tujuan penelitian yang akan dilakukan<sup>19</sup>. Maka dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah :

1. Ketua Komisioner KPU Kabupaten Sleman Ahmad Shidqi, S.Th.I.,M.Hum.
2. Ketua Umum DPD PAN Kabupaten Sleman Sadar Narima, S.Ag., S.H.
3. Ketua Umum PD Muhammadiyah Kabupaten Sleman Harjoko, S.Ag, S.Pd, M.Pdi

**e. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian merupakan ruang lingkup penelitian untuk mendapatkan data-data, gambaran dan berbagai macam informasi yang dibutuhkan peneliti. Adapun lokasi penelitian berada di; 1. Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional

---

<sup>19</sup> Adapun kualifikasi yang ditentukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: (a). mengerti dan memahami latar belakang terbangunnya relasi politik, (b). terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam serangkaian proses Pilkada, (c). merasakan implikasi dari relasi yang telah dibangun.



Kabupaten Sleman, alamat: Jl. Magelang, Km.10, Beran Lor, Tridadi, Sleman, DIY; 2. Sekretariat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, alamat: Sawahan, Pendowoharjo, Kecamatan Sleman, Sleman, DIY; 3. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sleman, alamat: Jl. Merbabu No.19, Tridadi, Sleman, DIY.

#### **f. Teknik Analisis Data**

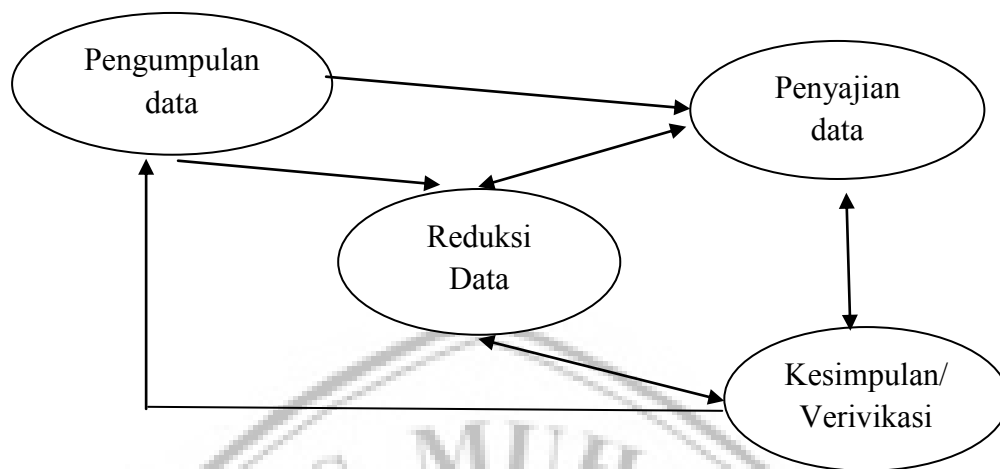
Menurut Bogdan dan Biklen (1992)<sup>20</sup>, analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Milles dan Huberman (1994)<sup>21</sup>, mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Analisis data kualitatif dalam model ini dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama sebelum dan sesudah proses pengumpulan data. Adapun tahapan analisa menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Dalam Husaini Usman dan Purnomo S. Akbar, 2009 *“Metodologi Penelitian Sosial”*, Jakarta: Bumi Aksara, Hlm. 84.

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm. 85.



Sumber: Husaini dan Setiady (2009:88)

**Gambar 1.1** Model Interaktif (Miles dan Huberman, 1994)

Pada gambar 1.1 memperlihatkan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, antara lain:

a. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, agar memperoleh data primer maupun data sekunder. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini lebih terfokus pada data yang menjadi tujuan peneliti.<sup>22</sup>

b. Reduksi Data

Tahap reduksi data yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul

<sup>22</sup>*Op.Cit.*Hlm.39

dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.<sup>23</sup> Dengan demikian data telah direduksi akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas, spesifik, dan menemui data-data yang berkaitan. Selain itu dapat mempermudah proses pengumpulan data selanjutnya.<sup>24</sup>

### c. Penyajian Data

Tahap penyajian data yaitu penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>25</sup> Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat reduksi data untuk di kelola lebih lanjut sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>26</sup>

### d. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis.<sup>27</sup> Pada tahapan ini merupakan proses untuk mencari sebuah inti dari keseluruhan penjelasan yang telah dipaparkan dan ini menjadi tahapan terakhir dari proses teknik analisis data. Melalui penarikan kesimpulan ini juga, temuan baru dalam penelitian yang berupa diskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas menjadi jelas setelah diteliti

<sup>23</sup>Miles, Methev dan Huberman, A. Michael, 1992. *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Barau*. Jakarta: UI Press. Hlm. 16

<sup>24</sup>*Op.Cit.* Hlm. 39

<sup>25</sup>Prof.Dr. Sugiono. *Op. Cit.* Hlm.237

<sup>26</sup>*Op.Cit.* Hlm.39

<sup>27</sup>*Ibid.* Hlm. 17